



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Banten
Dari : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
Tembusan : 1. Yth. Bapak Wakil Gubernur Banten
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten
3. Yth. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tanggal : Februari 2018
Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Hasil Rakernas APPSI Tahun 2018 di Bandung - Jawa Barat.**

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Surat Ketua Umum Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Nomor : A-008/APPSI/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 perihal Undangan mengikuti Rakernas APPSI Tahun 2018, dengan ini kami sampaikan hasil Rapat Kerja Nasional tersebut sebagai berikut :

- I. Rapat Kerja Nasional APPSI Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 Februari 2018 bertempat di Hotel Trans Luxury, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 289 Bandung - Jawa Barat, dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri RI dan ditutup oleh Ketua Umum Dewan Pengurus APPSI.
- II. Rapat Kerja Nasional APPSI dihadiri oleh Bapak Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 24 Gubernur, 6 Wakil Gubernur, 4 Sekretaris Daerah, pejabat pendamping dari masing-masing provinsi serta Dewan Pakar APPSI.
- III. Tema Rapat Kerja Nasional APPSI Tahun 2018 adalah “Kerjasama Perdagangan Antar Daerah Untuk Penguatan Ekonomi Nasional”.
- IV. Rangkaian Acara Rapat Kerja Nasional APPSI Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - A. Hari Pertama :

Acara welcome dinner dengan diawali sambutan selamat datang dari Gubernur Jawa Barat, dilanjutkan dengan laporan Ketua Umum Dewan Pengurus APPSI dan diakhiri dengan sambutan Menteri Dalam Negeri RI sekaligus membuka acara secara resmi.

 1. Ketua Umum Dewan Pengurus APPSI dalam laporannya menyampaikan pentingnya penguatan perdagangan antar daerah di Indonesia. Salah satu manfaatnya adalah dapat mengurangi atau menyetop ketergantungan pada produk impor. Untuk itu, penguatan ekonomi daerah akan menjadi isu utama dalam Rakernas tahun ini.

2. Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri RI menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu membentuk kekuatan besar dengan menyatukan berbagai kekuatan yang ada dari masing-masing daerah melalui kerjasama dan bersinergi, dengan kerjasama dapat mengatasi hambatan lingkungan untuk mencapai tingkat produktivitas perdagangan antar daerah yang lebih tinggi. Dalam kesempatan ini Mendagri juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Konsolidasi dengan semua pihak perlu dilakukan agar penyelenggaraan Pilkada tetap aman dan berjalan dengan tertib. Mendagri juga meminta kepada para kepala daerah agar mencermati isu-isu atau gejala-gejala yang bisa timbul yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan jelang Pilkada, khususnya masa rawan konflik mulai bulan Juni, Juli hingga Agustus 2018.

B. Hari Kedua :

Acara utama Rapat Kerja Nasional APPSI dengan diawali Diskusi Panel terkait tema Rakernas, dilanjutkan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama, Pembahasan dan Pengesahan Keputusan Rakernas, Pengarahan dari Bapak Presiden RI dan diakhiri dengan sambutan penutupan Rakernas.

1. Diskusi Panel dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Dalam diskusi ini Plt Sekjen Kemendagri menyampaikan bahwa kerjasama antar daerah masih belum menjadi prioritas setiap daerah, kerjasama antar daerah belum banyak disentuh karena selama ini pemerintah daerah masih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu dari segi regulasi, setidaknya ada tiga hal yang hendaknya menjadi perhatian, yakni :
 - a. Ketika dilakukan kerjasama antar daerah perlu dibentuk Sekretariat Kerjasama.
 - b. Perlunya melibatkan perusahaan atau BUMD, serta
 - c. Perlunya membentuk profesional manajemen dengan melibatkan pelaku bisnis yang akan merasionalkan bentuk kerjasama.

Masukan dari para gubernur, perlunya penguatan ekonomi domestik untuk memperkuat ekonomi nasional, salah satunya melalui penguatan perdagangan antar daerah. Penguatan ekonomi domestik ini perlu dilakukan karena adanya tantangan dalam memperkuat ekonomi nasional, yakni :

- a. Masih adanya ketergantungan terhadap impor bahan baku/penolong, dimana nilai impor bahan baku/penolong nasional sebesar 74,99 persen. Komoditas bahan baku impor ini sebenarnya dapat disubstitusi dengan produk lokal dari berbagai provinsi melalui penguatan perdagangan antar daerah.
- b. Masih tingginya biaya logistik antar pulau. Untuk itu perlu percepatan penguatan infrastruktur tol laut, juga perlu memperbaiki kemudahan berusaha serta memangkas berbagai prosedur perizinan.
- c. Belum adanya sistem data base yang secara detail menjelaskan potensi dan kebutuhan komoditas antar daerah/provinsi. Untuk itu perlu penguatan informasi potensi dan kebutuhan melalui penguatan

kerjasama antar daerah berupa informasi digital atas potensi dan kebutuhan.

2. Penandatanganan Kesepakatan Bersama Gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI tentang Kerjasama Perdagangan Komoditas dan Produk Unggulan Antar Daerah. Kesepakatan Bersama ini diharapkan dapat menjadi dasar atau landasan untuk memperkuat perdagangan antar daerah serta memperkuat supply chain surplus-defisit masing-masing daerah dalam rangka menjaga tingkat inflasi.
3. Pembahasan dan pengesahan keputusan Rakernas APPSI Tahun 2018 sebagai berikut :
 - a. Program Kerja APPSI Tahun 2018, terdiri atas 10 (sepuluh) program kerja. Provinsi Banten pada bulan Mei 2018 dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Seminar tentang Penguatan Komitmen Membangun Pemerintahan yang Baik Dalam Rangka Menjawab Tantangan Masa Depan.
 - b. Kenaikan Uang Iuran Tahunan Anggota APPSI, penentuan besaran uang iuran tahunan disesuaikan dengan besaran APBD masing-masing provinsi. Untuk Provinsi Banten, semula Rp. 100 juta per tahun naik menjadi Rp. 150 juta per tahun.
 - c. Rekomendasi kepada Pemerintah, terdiri atas 8 (delapan) hal.
4. Puncak acara Rakernas APPSI Tahun 2018 dengan arahan Bapak Presiden RI, dalam arahannya Presiden menekankan beberapa hal, diantaranya :
 - a. Presiden meminta seluruh kepala daerah untuk menyederhanakan prosedur dan proses terkait investasi dan ekspor, sebab salah satu penyebab utama masih rendahnya pengembangan investasi di tanah air adalah regulasi dan persyaratan yang berbelit-belit.
 - b. Untuk pertama kali dalam 20 tahun, Indonesia mendapatkan predikat layak investasi dari 3 (tiga) lembaga sekaligus, dengan nilai BB dari fitch rating. Investasi Indonesia naik menjadi 11,1 persen, sedangkan Malaysia turun 21 persen.
 - c. Integrasi sistem perizinan, integrasi ini harus segera terlaksana di pusat maupun di daerah selambatnya Maret 2018 agar proses perizinan lebih sederhana dan akuntabel.
 - d. Potong izin rekomendasi dan kuatkan dukungan pada sistem single submission.
 - e. Kepala daerah harus segera menindaklanjuti data produksi padi dengan tepat dan benar.
 - f. Investasi, infrastruktur dan SDM sangat penting, untuk itu harus segera dituntaskan.
 - g. Jangan kebanyakan program dan dibagi-bagi merata pada semua dinas. Fokus pada program prioritas sesuai visi dan misi kepala daerah. Misalnya tahun ini 60 persen untuk infrastruktur, tahun berikutnya 60 persen untuk SDM.
 - h. Buat aplikasi sistem hubungan pusat dan daerah, targetkan satu setengah bulan harus tuntas.

- i. Pertumbuhan ekonomi nasional sangat tergantung dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - j. Presiden meminta kepala daerah untuk menjaga kondusifitas daerah selama proses Pilkada Tahun 2018.
5. Sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus APPSI sekaligus menutup secara resmi Rakernas APPSI Tahun 2018.

C. Hari Ketiga :

Delegasi Rapat Kerja Nasional APPSI check out dan kembali ke daerah masing-masing.

Demikian kami laporkan, mohon menjadi periksa dan diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,



GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19741004 199402 1 002